

B U P AT I B E N G KAL I S

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR: 7Z/KPTS//2018

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BENGKALIS

Me nimban g:a.

4.

b. 5.

BUPATI BENGKALIS,

c bahwa sehubungan dengan adannya pernekaran wilayah Kecamatan sehingga berdampak pada letak wilayah Kecamatan dimana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Negeri tersebut berada; bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Negeri tersebut agar terselenggara dengan baik, lancar dan legal perlu dilakukan penetapan nomenklatur sekolah;

Mengingat:1.

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
- huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertarna dan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bengkalis;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
- Surnatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 25); Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Perul Tambahan Peme Lembaran Negara Tahu Indon Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peme Peme Lemb

Nornor 244, Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 5679);

Indonesia Nornor Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang Standar Sebagaimana telah Sebagaimana telah diubah beberapa 4496);

Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
UndangNomor 9
2015
Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);

2

6. Peraturan Pernerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor Tahun

2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5157);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310);
- 8. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
- IO. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksmana, Tualang Muandau dan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

KESATU

" Menetapkan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

"Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nornor: 163/KPPS/III/2008 tentang Penggantian Nama Nornenklatur Sekolah Kabupaten Bengkalis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 26 JANUARI 2018

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENOKALIS

NOMOR: 7a(L4PTg 11 (2019

TANGGAL: •26 JANUAR | aot9

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PEM'AMA DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BENGKALIS

NO					NPSN	KETERANGAN
	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN		
	2.	3.	4.	5.		7.
29	SDN 31 PENAMPI	BENGKAUS	29 BENGKALIS	BENGKALIS		PERUBAHAN NOMENKLATUR

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ